

KEPERCAYAAN PUBLIK DAN NILAI RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Desi Darmawati¹⁾, Riri Zelmianti²⁾

Program Studi Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Batam 29461, Indonesia

¹⁾E-mail: desidarmawati98@gmail.com

²⁾E-mail: riri@polibatam.ac.id

ABSTRACT

Research on taxpayer compliance behavior is aimed at many external factors, this research will focus on internal factors. Internal factors that still need attention are trust and the value of religiosity. The purpose of this study was to determine the effect of the Dimensions of Public Trust, Value of Religiosity on Taxpayer Compliance. The object of research uses Motorcycle Taxpayers in Batam City. The research sample of 110 respondents. The research method uses a quantitative approach. The type of data uses primary data with a questionnaire method and uses simple random sampling technique. Data analysis was performed with SPSS version 26.0 and multiple linear regression hypothesis testing. The results of this study indicate the variable of public trust and the value of religiosity significantly and positively influences with a contribution of 15.2% to taxpayer compliance.

Keywords: *Dimensions of Public Trust; Religiosity; Tax Compliance*

ABSTRAK

Penelitian tentang perilaku kepatuhan wajib pajak banyak ditujukan pada faktor eksternal, penelitian ini akan memfokuskan pada faktor internal. Faktor internal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu kepercayaan dan nilai religiusitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Dimensi Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Obyek penelitian menggunakan Wajib Pajak Sepeda Motor di Kota Batam. Sampel penelitian berjumlah 110 responden. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data menggunakan data primer dengan metode kuesioner serta menggunakan teknik *simple random sampling*. Analisis data dilakukan dengan program SPSS versi 26.0 dan uji hipotesis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepercayaan publik dan nilai religiusitas berpengaruh secara signifikan dan positif dengan kontribusi sebesar 15,2% terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Dimensi Kepercayaan Publik; Religiusitas; Kepatuhan Pajak

1. PENDAHULUAN

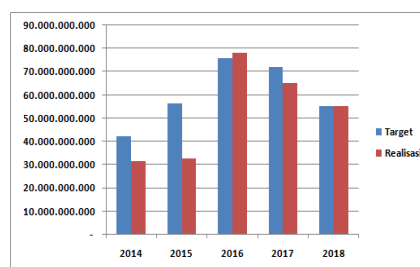
Permasalahan kepatuhan perpajakan masih menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi pemerintah di dunia termasuk di Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tergolong rendah hal ini digambarkan dari tingkat *tax ratio* yang rendah dalam beberapa periode. *Tax ratio* Indonesia masih dibawah rata-rata negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dimana *tax ratio* di negara tersebut berkisar pada angka 34%. *Tax ratio* Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, *Tax ratio* Malaysia pada tingkat 13,6%, Singapura 14,1 %, dan Filipina 17,5%. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai target sejak tahun 2014 - 2018. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan cerminan dari target realisasi penerimaan yang belum tercapai.

Pendapatan negara Indonesia menurut APBN per 2019, menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari pendapatan negara berasal dari pajak sebesar Rp 1.786.400.000.000.000,- atau sekitar 83% dari jumlah total pendapatan¹. Salah satu pajak daerah yang menyumbang pendapatan kabupaten/kota adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PKB menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 3 adalah pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Batam merupakan salah satu kota di provinsi Kepri yang memiliki jumlah kendaraan terbanyak terdapat sekitar 60% kendaraan di Kepri berada di Kota Batam. Perlakuan pajak di Kota Batam memiliki keistimewaan dari daerah lain sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah RI No 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Batam ditetapkan sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) yang artinya bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan bea cukai². Peraturan ini berdampak pada kondisi penerimaan pendapatan pajak dari sektor PKB. Pada grafik dibawah ini disajikan angka penerimaan pendapatan dari pajak sepeda motor di Kota Batam.

Gambar 1 Grafik Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam



Sumber: Bidang Akuntansi & Pelaporan BPKAD Kota Batam)

Berdasarkan grafik di atas bisa dilihat angka dari target dan penerimaan pendapatan dari sektor PKB mengalami fluktuatif dari periode 2014 - 2018. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka dapat menimbulkan permasalahan. Pemerintah daerah tentunya mengharapkan angka penerimaan stabil setiap tahunnya bahkan terus mengalami peningkatan dari target yang diharapkan tetapi pada realisasinya penerimaan belum stabil setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang APBD sekitar 40% dari total PAD provinsi Kepri,

¹Dapat diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, pada 01 September 2019

²Dapat diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2012/04/26/free-trade-zone-5/>, pada 9 Oktober 2019

dispenda.kepriprov.go.id 2018. Di sisi lain, tingkat kepatuhan dari WP kendaraan bermotor masih minim dilihat dari kondisi penerimaan yang belum stabil.

Penelitian tentang kepatuhan pajak saat ini lebih memfokuskan pada faktor non-ekonomi, faktor non-ekonomi yang terdiri dari dua sudut pandang (Benk, Budak, Yuzbasi, & Mohdali, 2016). Pertama, faktor Internal yang bersumber dari dalam diri individu WP. Kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar diri WP yang bersumber dari situasi dan lingkungan sekitar.

Banyak penelitian yang berhubungan dengan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti faktor religiusitas dari wajib pajak yang sejalan dengan penelitian Benk, Budak, Yuzbasi & Mohdali (2016), Utama & Wahyudi (2016), Mohdali & Pope (2014), penelitian tentang aspek religiusitas, sanksi dan kepatuhan oleh (Zelmiyanti, 2017), Nurjannah (2017) dan penelitian ini juga pernah dilakukan oleh, Salsabila (2017), dan (Fahmiyah, 2018).

Faktor lainnya yaitu kepercayaan publik terhadap Kepatuhan WP telah diteliti oleh (Huda, Basri, & Julita, 2015). Penelitian tentang variabel Sosialisasi, Sanksi Pajak dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan WP dilakukan oleh (Ariani, Defrianto, & Zulhawati, 2016), *Privilege*, sosialisasi, dan kepercayaan kepada otoritas pajak (Mardianto & Astuti, 2017). Arismayani, Yuniarta, & Yasa (2017) telah meneliti tentang variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi, tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tentang pemahaman, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan WP oleh (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Penelitian saat ini akan membahas faktor non-ekonomi yang perlu mendapat perhatian yaitu religiusitas atau nilai agama (Benk, Budak, Yuzbasi, & Mohdali, 2016). Nilai agama dianggap dapat mengontrol

prilaku negatif dan mendorong seseorang untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menekankan pada faktor religiusitas, karena Indonesia sangat menghargai nilai-nilai religiusitas seperti yang tertuang dalam sila pertama pancasila, yang mengandung arti bahwa warga negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, posisi agama di Indonesia sangat penting diperkirakan persentasenya mencapai 98% angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat AS pada angka 71,6%, dan India sekitar 80,7%, menurut Asisten Profesor Studi Global di Universitas Boston, Amerika Serikat (AS), Menchik³.

Selain religiusitas faktor internal kepatuhan pajak yang dilihat yaitu kepercayaan. Kepercayaan publik yang mulai menurun terhadap otoritas dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Menurunnya kepercayaan wajib pajak disebabkan banyaknya kasus penyelewengan dana pajak seperti kasus Sukanto Tanoto pendiri dan Chairman RGE Asian Agri group yang banyak merugikan negara dan kasus Gayus yang cukup fenomenal. Kasus penggelapan pajak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan WP. Teori yang menghubungkan antara variabel Kepatuhan Pajak dan Kepercayaan publik adalah teori *Slippery Slope*.

Penelitian saat ini adalah pengembangan dari penelitian Benk, Budak, Yuzbasi & Mohdali (2016) dan (Zelmiyanti, 2017). Penelitian saat ini menambahkan variabel kepercayaan dalam penelitian karena banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang berakibat pada turunnya tingkat kepatuhan WP. Penelitian sebelumnya mengulas kepatuhan pajak dari dua sisi yaitu kepatuhan pajak sukarela dan

³Dapat diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/16/03/10/o3tcw78-indonesia-negara-demokrasi-yang-religius>, pada 4 September 2019.

dipaksakan yang dilakukan di Kota Malatya, Turki.

Penelitian saat ini akan menekankan pada kepatuhan pajak secara sukarela untuk menguatkan pemahaman terhadap kepatuhan pajak secara sukarela dari perspektif yang berbeda. Kemudian terdapat perbedaan pada tempat, sampel dan populasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris bahwa kepercayaan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang motivasi dari perilaku seseorang. Teori ini mengarah pada penyebab dari perilaku dirinya sendiri maupun orang lain berasal dari internal seperti sifat, karakter, dan sikap atau dari eksternal seperti tekanan situasi atau suatu keadaan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Luthans, 2005).

Teori *Slippery Slope*

Teori *Slippery Slope* menyatakan kepatuhan pajak muncul karena dua hal yaitu: 1). *Power of Authorities* dan 2). *Trust in authorities* (Kogler, Muehlbacher, & Kirchler, 2013). Teori *Slippery Slope* mendukung bahwa psikologi sosial mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela. Pendekatan yang sesuai untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak sukarela diukur melalui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan berarti suatu keyakinan dan pengharapan yang baik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan integritas,

terhindar dari risiko bawaan dalam hubungan yang melibatkan kepercayaan serta memberikan hasil positif bagi pihak yang telah dipercaya (Pappers, Martha, & Rogers, 2004). Teori *Slippery Slope* mendukung perilaku kepatuhan WP yang mengatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikologi sosial yang muncul melalui *trust in authorities* atau kepercayaan terhadap otoritas. Aspek ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara membangun kepercayaan yang berasal dari internal masyarakat terhadap otoritas pajak sehingga dapat dihasilkan kepatuhan pajak secara sukarela.

Penelitian terdahulu yang menghubungkan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak dilakukan Huda, Basri & Julita (2015), Arsmayani, Yuniarta & Yasa (2017) serta Ariani, Defrianto & Zulhawati (2016). Hal yang menjadi fokus dari kepercayaan terhadap sistem pemerintahan adalah kondisi hubungan pada saat ini antara negara dan warga negaranya. Jika masyarakat memberikan apresiasi bahwa negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat dan sebaliknya. Sehingga negara harus selalu menjaga hubungan baik dengan warganya dengan melakukan tindakan yang positif. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dimensi Kepercayaan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

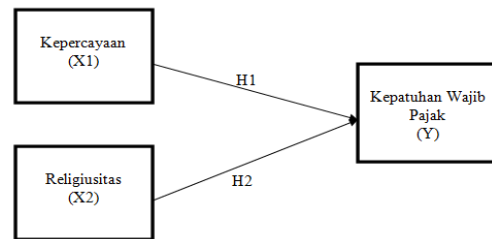
Pengaruh Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Religiusitas dinilai sebagai seberapa besar komitmen individu terhadap agamanya serta implementasinya dalam kehidupan, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut (Johnson, et al., 2001). Komitmen agama terdiri dari dua jenis yaitu religiusitas

intrapersonal yang bersumber dari kepercayaan dan sikap individu dan interpersonal yaitu keikutsertaan individu dengan organisasi keagamaan (Worthington, et al., 2003). Teori atribusi mendukung variabel religiusitas yang bersumber dari internal individu yang mengarah pada karakter yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian dan niat individu dalam berperilaku. Peranan dari nilai agama diharapkan dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang dan mendorong untuk berperilaku baik sesuai ajaran agamanya seperti niat untuk menaati peraturan perpajakan dan bersikap jujur dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Benk, Budak, Yuzbasi, & Mohdali, 2016), Zelmiyanti (2017), serta penelitian dari (Utama & Wahyudi, 2016). Hasilnya menyatakan nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan dan didukung oleh penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa nilai religiusitas mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religiusitas sesuai yang tertuang dalam dasar negara RI Pancasila pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tingkat religiusitas seseorang akan memberikan efek pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, semakin besar motivasi dan pengamalan nilai agama seperti kejujuran dari wajib pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan dalam perpajakan. Berdasarkan uraian ini maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2 Desain Penelitian
Sumber: Diolah peneliti (2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen kepercayaan publik (X1) dan nilai religiusitas (X2) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak di Kota Batam. Sampel penelitian diambil dengan dengan cara jumlah pertanyaan dikalikan 5 sesuai dengan penentuan jumlah sampel yang *representative* menurut (Hair, et al., 2014). Sehingga jumlah sampel penelitian nantinya 22 pertanyaan*5 = 110 responden.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah menggunakan alat statistik berupa aplikasi SPSS versi 26. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas dan uji hipotesis (regresi liner berganda) serta uji statistik t. Adapun model persamaan penelitian sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi variable independen

X_1 = Kepercayaan Publik

X₂ = Religiusitas
E = Error

>45 10 9,09%

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak sepeda motor yang ada di Kota Batam. Ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ditetapkan dengan cara jumlah pertanyaan dikalikan 5 sesuai dengan penentuan jumlah sampel yang *representative* menurut (Hair, et al., 2014).

Tabel 1. Karakteristik Data

Keterangan	Frekuensi
Kuesioner yang disebarakan	110
Kuesioner yang tidak dikembalikan	0
Jumlah sampel yang digunakan	110

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Responden yang telah mengisi kuesioner kemudian diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, agama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui secara umum karakteristik responden penelitian.

Tabel 2. Klasifikasi Responden

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin		
Laki-laki	47	42,73%
Perempuan	63	57,27%
Agama		
Islam	104	94,55%
Kristen	5	4,54%
Katolik	0	0
Budha	1	0,91%
Hindu	0	0
Budha	1	0,91%
Usia		
17-25	63	57,27%
25-35	24	21,82%
36-45	13	11,82%

Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel 3 yang menunjukkan data statistik deskriptif dari setiap variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
X1	110	10	25	20,55	2,410
X2	110	29	50	41,96	4,704
Y	110	18	35	27,55	4,480

Sumber: Data diolah dari SPSS 26

Hasil uji deskriptif akan dilihat melalui nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi. Variabel kepercayaan publik (X1) memiliki nilai minimum sebesar 10, maksimum sebesar 25 yang berarti bahwa tanggapan responden untuk variabel ini diantara tidak setuju dan sangat setuju, *mean* sebesar 20,55 dan standar deviasi sebesar memiliki nilai 2,410 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,410 dari 110 responden. Nilai religiusitas memiliki nilai rata-rata 41,96 untuk nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum 50 yang berarti bahwa tanggapan responden untuk variabel ini diantara kurang setuju dan sangat setuju untuk standar deviasi memiliki nilai 4,704 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel nilai religiusitas adalah 4,704 dari 110 responden. Nilai variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 27,55 dan nilai minimum sebesar 18 serta nilai maksimum 35 yang berarti bahwa tanggapan responden untuk variabel ini diantara tidak setuju dan sangat setuju untuk standar deviasi memiliki nilai 4,480 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel nilai religiusitas adalah 4,480 dari 110 responden. Hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS versi 26.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	7,313	4,462	0,104
Kepercayaan Publik	0,583	0,167	0,001
Nilai Religiusitas	0,197	0,086	0,024

Sumber: Data diolah dari SPSS 26

$$KPW = 7,313_{\alpha} + 0,583x_1 + 0,197x_2$$

Persamaan di atas menunjukkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan signifikan. Nilai Konstanta sebesar 7,313 menunjukkan jika variabel independen yaitu Kepercayaan publik dan Nilai Religiusitas diasumsikan tidak mengalami perubahan (Konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 7,313. Nilai Koefisien variabel kepercayaan publik sebesar 0,583 artinya setiap kenaikan variabel kepercayaan publik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,583 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara Untuk koefisien nilai religiusitas sebesar 0,197 artinya bahwa setiap kenaikan variabel nilai religiusitas satu satuan, maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,197 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai signifikansi dari H1 sebesar 0,001 yang menyatakan H1 terdukung atau diterima. Hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dari H2

sebesar 0,024 yang menyatakan H2 terdukung atau diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat Religiusitas seseorang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan pajak.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji koefisien secara tunggal. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikansi t dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	7,313	4,462	1,639	0,104
Kepercayaan Publik	0,583	0,167	3,481	0,001
Nilai Religiusitas	0,197	0,086	2,291	0,024

Sumber: Data diolah dari SPSS 26

Dari tabel hasil uji-t dapat dilihat t_{hitung} untuk variabel Kepercayaan Publik adalah sebesar $3,481 > t_{tabel}$ yaitu 1,9822 dengan tingkat signifikansi 0.05 Artinya variabel kepercayaan publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan pajak dan variabel nilai religiusitas menunjukkan hasil nilai t_{hitung} sebesar $2,291 > t_{tabel}$ yaitu 1,9822 sehingga kesimpulannya Nilai Religiusitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Kepatuhan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Kepercayaan pada otoritas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa wajib pajak kendaraan roda dua di Kota Batam percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan. Kepercayaan masyarakat ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini harus tetap dijaga oleh pemerintah. Tidak hanya dengan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah saja yang meningkat, pada saat ini masyarakat sadar dengan pajak yang mereka bayarkan sudah memberikan dampak pada mereka dengan berbagai fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pun akan meningkat.

- b. Nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa tingkat religiusitas wajib pajak kendaraan roda dua di kota batam berperan dalam mencegah seseorang berperilaku menyimpang dan mendorong untuk berperilaku positif sesuai ajaran agama seperti menaati peraturan dan bersikap jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu wajib pajak di kota batam telah membuktikan menjunjung tinggi nilai agama sesuai yang tertuang dalam pancasila pada sila pertama yaitu “ketuhanan yang maha esa”. Tingkat religiusitas individu ini yang memberikan efek pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut seperti motivasi wajib pajak yang semakin besar dan pengamalan nilai agama seperti kejujuran dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sehingga dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menanamkan nilai-nilai agama sejak awal.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dikarenakan waktu dan pengumpulan data yang terbatas.

Keterbatasan tersebut diantaranya adalah: (1). Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua dan lokasi penelitian hanya dilakukan di satu tempat yaitu Kota Batam, (2) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas yaitu Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas yang menjelaskan kontribusi sebesar 15,2 % dari variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak Sehingga 84,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian, (3) teknik penarikan sampel menggunakan *Simple Random sampling* sehingga untuk hasil penyebaran kuisisioner kepada responden berdasarkan agama menjadi kurang merata, (4) menggunakan kuisisioner sebagai instrumen penelitian dan menggunakan bantuan *Google form* dalam penyebarannya, oleh karena itu peneliti tidak selalu mendampingi responden. Sehingga memungkinkan terjadinya bias yang disebabkan adanya kemungkinan responden tidak bersungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan.

Implikasi dan Saran

Implikasi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi atas implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan khususnya pajak kendaraan bermotor. Serta menjadi masukan bagi pihak DJP sebagai pemungut pajak untuk mempertahankan integritas, profesionalitas dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

Saran untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat dapat dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan tidak hanya untuk kendaraan roda dua dan lokasi penelitian dapat diperluas, kemudian dapat mengembangkan

model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi dan belum digunakan dalam penelitian ini, misalnya faktor ekonomi seperti kondisi ekonomi, tarif pajak, denda serta tingkat pendapatan dan faktor non-ekonomi yang berasal dari perilaku Wajib Pajak seperti persepsi Wajib Pajak, Kemudian faktor internal seperti nasionalisme, persepsi korupsi dan faktor eksternal seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Selanjutnya disarankan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* dengan mengelompokkan jumlah sampel penelitian dari berbagai jenis agama sehingga hasil penyebaran kuisisioner kepada responden berdasarkan agama merata, yang terahir diharapkan dapat meningkatkan keakuratan pengisian kuisisioner dengan mendampingi responden dalam mengisi kuisisionernya. Kemudian dapat menggunakan tambahan metode selain kuisisioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif, seperti wawancara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Mengucapkan terima kasih kepada sejumlah rekan dan saudara yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. R. (2018). Pengaruh Norma subjektif, Keadilan Perpajakan, Religiusitas dan *Self Efficacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi* .
- Ariani, M., Defrianto, & Zulhawati. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan terhadap Aparat Pajak dalam Kepatuhan Individu Wajib Pajak Membayar Pajak PPh pasal 21 (Studi Empiris KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* , Vol. 3, No. 2, hal 161-175 ISSN 2339 1545.
- Arismayani, I. N., Yuniarta, I. G., & Yasa, I. N. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *e-Journal* , Vol. 8 No. 2.
- Benk, S., Budak, T., Yuzbasi, B., & Mohdali, R. (2016). *The Impact of Religiosity on Tax Compliance among. Religions, MDPI* , ISSN 20071444 Page 1-10.
- Dijke, M. V., & Verboon, P. (2010). *Trust In Authorities As a Boundary Condition to Procedural Fairness Effect On Tax Compliance. Journal Of Economy Psychology* , 80-91.
- Fahmiah, T. (2018). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. *Artikel Ilmiah* , Hal 1-19.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, P. D. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, F, J., Jr, C, W., Black, Berry, et al. (2014). *Multivariate Data Analysis*. Dalam Hair, J. F, Jr, W. C, Black, Berry, et al., *Multivariate Data Analysis* (hal. 100). British: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Huda, A., Basri, Y. M., & Julita. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jom FEKON* , Vol.2 No.2 .
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). *Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in Government and Perceived Fairness*

- on taxpayer compliance. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 10.
- Johnson, B. R., Jang, S.J, Larson, D.B, et al. (2001). *Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency*, 22-44.
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2013). *Trust, power, and tax compliance: Testing the "slippery slope framework" among self-employed taxpayers. WU International Taxation Research Paper Series*, 1-18.
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi. Dalam L. Fred. Yogyakarta: Edisi Sepu. Andi.*
- Mardianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. Jurnal kajian Akuntansi*, Vol. 1 Hal 77-86.
- Nurjannah, I. (2017). *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. Skripsi*.
- Pappers, Martha, & Rogers. (2004). *Managing Customer Relationship: A Strategic Frame Work. Canada: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.*
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). *Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 1 Januari 2013, Hal. , Vol.2 No. 1 Januari 2013 Hal 1-15.*
- Salsabila, N. U. (2017). *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.*
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib. Jurnal Lingkar Widya Swara*, Edisi 3 No 2 p.01-13.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak. Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*, ISSN 2460-0784.
- Worthington, E. L., J., Wade, N. G., Hight, T. L., J. S., M., M. E., B., et al. (2003). *The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. Journal of Counseling Psychology*, 84-96.
- Zelmiyanti, R. (2017). *Aspek Religiusitas, Sanksi dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 11 No 2 Hal 127-137.
- Zelmiyanti, R. (2016). *Keadilan Prosedur, dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisa Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Hal 1101-1110.